

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEMBANTU BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERKAIT KASUS PENUNGGAK PAJAK DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Depitha Sukmadayanti¹, Niken Wahyuning Retno Mumpuni²

RINGKASAN

Jaksa Pengacara Negara berperan sebagai Pengacara Negara yang mewakili Pemerintah, BUMN/BUMD melalui Surat Kuasa Khusus dalam menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Jaksa Pengacara Negara dalam membantu BPPRD menangani masalah penunggakan pajak ditinjau dari aspek keperdataan, serta sanksi yang diterapkan oleh BPPRD dan Jaksa Pengacara Negara kepada penunggak pajak. Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dalam hal ini memilih penyelesaian melalui non-litigasi yaitu mediasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dan empiris. Penelitian ini mengkaji studi kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta data lapangan guna memahami hubungan antara teori dan praktik yang ada. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh keselarasan teori dan penerapan peraturan dalam praktik di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan mediasi oleh Jaksa Pengacara Negara, permohonan bantuan hukum yang dilakukan oleh BPPRD kepada Jaksa Pengacara Negara dilatarbelakangi oleh adanya 10 kasus penunggak pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. melalui pemberian Surat Kuasa Khusus oleh BPPRD kepada Jaksa Pengacara Negara dengan proses mediasi dimana Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai mediator. Setelah dilakukan mediasi Kejaksaan Negeri Lampung Selatan berhasil mendatangkan 10 penunggak pajak, dan berdasarkan Akta Perdamaian yang telah disepakati, penunggak pajak berkomitmen untuk membayarkan angsuran pajak.

BPPRD dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan harus melakukan pemantauan yang intensif terhadap kasus-kasus penunggak pajak. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan, langkah penindakan yang tegas perlu dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini akan memberikan efek jera bagi para penunggak pajak dan mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, BPPRD, Mediator, Penunggak Pajak

¹ Mahasiswa, Program Studi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen, Program Studi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**THE ROLE OF THE STATE ATTORNEY AS A MEDIATOR IN ASSISTING
THE REGIONAL TAX AND LEVY MANAGEMENT AGENCY RELATED TO
TAX DELINQUENT CASES IN SOUTH LAMPUNG REGENCY**

Depitha Sukmadayanti³, Niken Wahyuning Retno Mumpuni⁴

ABSTRACT

The State Attorney acts as a State Attorney representing the Government, BUMN / BUMD through a Special Power of Attorney in handling Civil and State Administrative cases. The problem of this research is to find out the role of the State Attorney in helping BPPRD handle tax delinquency problems in terms of civil aspects, as well as sanctions applied by BPPRD and the State Attorney to tax delinquents. The South Lampung State Attorney's Office in this case chose a non-litigation settlement, namely mediation.

The methods used in this research are normative and empirical law. This research examines literature studies obtained from primary, secondary, tertiary legal materials, as well as field data to understand the relationship between existing theory and practice. The purpose of this research is to obtain harmony of theory and application of regulations in practice in the community.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that after mediation by the State Attorney, the request for legal assistance made by BPPRD to the State Attorney was motivated by the existence of 10 cases of tax delinquents who did not fulfill their obligations to pay taxes. through the granting of a Special Power of Attorney by BPPRD to the State Attorney with a mediation process where the State Attorney acts as a mediator. After mediation, the South Lampung District Attorney's Office managed to bring in 10 tax delinquents, and based on the agreed Peace Deed, tax delinquents committed to paying tax installments.

BPPRD and the South Lampung District Attorney's Office must conduct intensive monitoring of tax delinquent cases. If violations or non-compliance are found, strict action needs to be taken in accordance with applicable law. This will provide a deterrent effect for tax arrears and encourage compliance with tax obligations.

Keywords: *State Attorney, BPPRD, Mediator, Tax Delinquent*

³ Student, Department of Law, Jenderal Achmad Yani University Of Yogyakarta

⁴ Lecturer, Department of Law, Jenderal Achmad Yani University Of Yogyakarta